

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Ali, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Dewa, Muh. Jufri, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, *et.al.*, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariwijaya dan Djaelani, Bisri M., 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Herdiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1993, Buku II, Cetakan Keempat, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jansen, Oswald, 2008, *Comparative Inventory of Silencio Positivo*, Institute of Constitutional and Administrative Law Utrecht School of Law, Belanda.
- Keban, Yeremias T., 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Mangkoedilaga, Benjamin, 1983, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Orientasi Pengenalan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, *et.al.*, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Martitah, Arif Hidayat dan Aziz W. Nugroho, 2018, *PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, BPFH Unnes, Semarang
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mawardi, Irvan, 2016, *Paradigma Baru PTUN (Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi)*, Thafa Media, Yogyakarta
- Praag, Van, 1979, *Bestuursrecht*, terjemahan dari Lembaga Administrasi Negara R.I., Jakarta.
- Prins, W.F. dan R. Kosim Adisapoetra, 1987, Cetakan Keenam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri dan Tjandra, Riawan, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- _____, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Adminsitrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo dan Ropii, Imam, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Simanjuntak, Enrico, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2018, *Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*, Gramata Publising, Bekasi.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan dan Widodo, Ismu Gunadi, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utama, Yos Johan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- Yasin, Muhammad, *et.al.* (Tim Penyusun), 2017, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Aschari dan Harjiyatni, Fransisca Romana, “Kajian tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif”, *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Charity, May Lim, “Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, September 2015, hlm. 304.
- Rodding, Budiamin, “Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, January 2017.
- Heriyanto, Bambang, “Problematika Penyelesaian Perkara ‘Fiktif Positif’ di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 5, Nomor 1, Januari – Juni, 2019.

Marzuki, H.M. Laica, “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI”, Makalah, Disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan Tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2017.

Simanjuntak, Enrico, “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, November 2017.

Susanto, Sri Nur Hari, “Merekonstruksi Sistem Hukum Administrasi Menuju Hukum yang Melayani”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 44, Nomor 2 (2015), November, 2015.

C. Tugas Akhir

Harmono, 2017, *Politik Hukum Keputusan Tata Usaha Negara dari Fiktif Negatif menjadi Fiktif Positif dan Implikasinya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muchsan, 1979, *Perbuatan Pemerintah dalam Memperoleh Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rusjana, M., 2017, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif melalui Peradilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siregar, Tongku, 2018, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Jalur Mediasi oleh Mediator Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Risalah Pandangan/ Penjelasan Presiden/ Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan (RUU AP) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI Tahun Sidang 2013-2014 pada Masa Persidangan III tanggal 25 Februari 2014, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181011-090710-8020.pdf, diakses 11 Oktober 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1751)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

F. Putusan/ Penetapan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2012/PTUN.SBY., perihal Gugatan KTUN Fiktif Negatif perkara PT Subore Subur Makmur, tanggal 25 Juni 2012.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 036/G/2015/PTUN.Smg., perihal Gugatan KTUN Fiktif Negatif perkara Ir. Irwan Santoso, M.BA tanggal 12 November 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 078/G/2015/PTUN.SMG, perihal Gugatan Fiktif Negatif Wiwi Sukoyo, tanggal 26 Mei 2016.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 010/P/FP/2016/PTUN.SMG, perihal Permohonan Fiktif Positif Ratna Untari, dkk tanggal 30 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 01/P/FP/2016/PTUN-SRG, perihal Permohonan Fiktif Positif H. Zaeni, tanggal 14 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/P/FP/2017/PTUN.SMG, perihal permohonan Perkara Fiktif Positif Uut Srihayu, tanggal 16 Maret 2017.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.SMG perihal Permohonan Perkara Fiktif Positif Arif Mustaghfirin, 7 Maret 2018.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 73/G/2017/PTUN.SMG, perihal Gugatan Fiktif Negatif Achmad Suroso Hindarto, dkk tanggal 3 Mei 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2012/PT.TUN.SBY Perihal Banding Perkara Fiktif Negatif Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan PT Bank Mandiri, Tbk, tanggal 12 Oktober 2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/B/2016/PT.TUN.SBY Perihal Banding Perkara Fiktif Negatif Irwan Santoso tanggal 27 April 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2018/PT.TUN.SBY Perihal Banding Perkara Fiktif Negatif Achmad Suroso Hindarto, dkk, 1 Oktober 2018.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45 K/TUN/2013 Perihal Kasasi Perkara Fiktif Negatif Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan PT Bank Mandiri, tanggal 7 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 PK/TUN/2016, perihal Peninjauan Kembali Perkara Fiktif Negatif Irwan Santoso, tanggal 15 Desember 2016.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/TUN/2016, perihal Peninjauan Kembali Perkara Fiktif Positif Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2016.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 PK/TUN/2018, perihal Peninjauan Kembali Perkara Fiktif Negatif Irwan Santoso, tanggal 19 Februari 2018.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/TUN/2019 Perihal Kasasi Perkara Fiktif Negatif Achmad Suroso Hindarto, dkk, 12 Maret 2019.